



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH

Telah Terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
Melalui KPPN Jakarta II sejumlah : Rp. _____
Terbilang : _____
Melalui BO III PBB Sejumlah : Rp. _____
Terbilang : _____
Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA
Bulan :
Daerah : Prov/Kab./Kota

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	Diterima Tanggal
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN JAKARTA II		
TRANSFER DBH PAJAK		
- DBH PPh Pasal 21, Triwulan	Rp. -	
- DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDI, Triwulan	Rp. -	
- DBH PBB Bagian Pusat, Tahap ...	Rp. -	
- DBH PBB Migas, Triwulan ...	Rp. -	
- Biaya Pemungutan PBB Migas, Triwulan ...	Rp. -	
- DBH PBB Bagian Migas, Triwulan ...	Rp. -	
TRANSFER DBH CUKAI		
- DBH Cukai Hasil Tembakau Triwulan ...	Rp. -	
TRANSFER DBH SDA		
PERTAMBANGAN UMUM :		
- Pertambangan Umum - Landrent Triwulan ...	Rp. -	
- Pertambangan Umum - Royalti Triwulan ...	Rp. -	
MINYAK :		
- Minyak 15% Triwulan ...	Rp. -	
- Minyak 0,5% Triwulan ...	Rp. -	
- Minyak Dalam Rangka Otus Triwulan ...	Rp. -	
GAS :		
- Gas 30% Triwulan ...	Rp. -	
- Gas 0,5% Triwulan ...	Rp. -	
- Gas Dalam Rangka Otus Triwulan ...	Rp. -	
PANAS BUMI :		
- Panas Bumi ...	Rp. -	
KEHUTANAN :		
- PSDH Triwulan ...	Rp. -	
- IUPH Triwulan ...	Rp. -	
- DR Triwulan ...	Rp. -	
PERIKANAN :		
- Perikanan Triwulan ...	Rp. -	
TRANSFER DAV		
Dana Alokasi Umum	Rp. -	
TRANSFER DAK		
Dana Alokasi Khusus Tahap ...	Rp. -	
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS		
Dana Otus Provinsi ...	Rp. -	
TRANSFER DANA PENYESUAIAN		
- Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	Rp. -	
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp. -	
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp. -	
- Dana Insentif Daerah (DID)	Rp. -	
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	Rp. -	
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Rp. -	
II. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BO III		
DBH PBB Bagian Daerah & Biaya Pemungutan		
PBB Bagian Daerah Bulan ... T.A.	Rp. -	
Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Bulan ... T.A.	Rp. -	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

*) Untuk PBB dan BP PBB Bagian Daerah, monon diisi sejumlah yang diterima dari BO III selama satu bulan yang bersangkutan.

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : _____
Nama Rekening : _____
Nama Bank : _____

..... 20....

Bupati / Pejabat yang ditunjuk dengan SK Bupati

MATERAI
Rp.6000,-



MENTERI KEUANGAN

td.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Tahap I	:	Rp
Tahap II	:	Rp
Tahap III	:	Rp
Total	:	Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Tahap Ini	:	Rp
Kumulatif s.d. Tahap Ini	:	Rp

Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah

Persentase Sisa Dana DAK	:	%
--------------------------	---	---

No.	Bidang *)	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan SD	-	-	-	-	-
2.	Pendidikan SMP	-	-	-	-	-
3.	Kesehatan Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-
4.	Kesehatan Pelayanan Farmasi	-	-	-	-	-
5.	Kesehatan Pelayanan Rujukan	-	-	-	-	-
6.	Infrastruktur Jalan	-	-	-	-	-
7.	Infrastruktur Irigasi	-	-	-	-	-
8.	Infrastruktur Air Minum	-	-	-	-	-
9.	Infrastruktur Sanitasi	-	-	-	-	-
10.	Prasarana Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
11.	Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-
12.	Pertanian	-	-	-	-	-
13.	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
14.	Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
15.	Kehutanan	-	-	-	-	-
16.	Sarana dan Prasarana Perdesaan	-	-	-	-	-
17.	Perdagangan	-	-	-	-	-
18.	Keselamatan Transportasi Darat	-	-	-	-	-
19.	Listrik Perdesaan	-	-	-	-	-
20.	Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-
21.	Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	-
22.	Transportasi Perdesaan	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

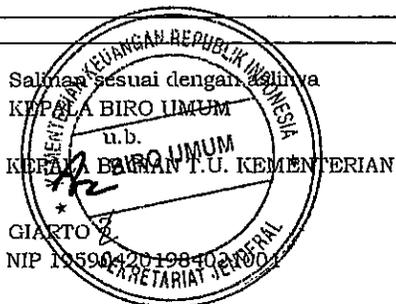
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Kepala Daerah

Nama

Keterangan :

- *) Uraian Bidang disesuaikan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.



MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *)
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)..... telah/akan *)
menyediakan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus sekurang-kurangnya 10% untuk
masing-masing bidang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan *) Tahun Anggaran 2011.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

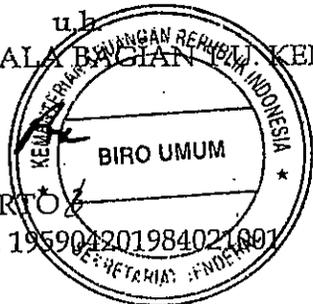
Tempat, tanggal.....
Kepala Daerah.....

Nama

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN



GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGOARAN
TRANSFER KE DAERAH

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

KOP SURAT

DOKUMEN PENDUKUNG
LAPORAN PENYERAPAN
PENGGUNAAN DAK TAHUN TAHUN

REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI
OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN

No	SP2D		NILAI ¹⁾		KETERANGAN ²⁾
	Nomor	Tanggal	DAK	DANA PENDAMPING	
A. PENDIDIKAN SD					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
B. PENDIDIKAN SMP					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
C. KESEHATAN PELAYANAN DASAR					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
D. KESEHATAN PELAYANAN FARMASI					
1	001		Rp -	Rp -	
2	002		Rp -	Rp -	
3	dst		Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp -	Rp -	
JUMLAH TOTAL			Rp -	Rp -	

TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN

Kepala Daerah³⁾

NAMA

Keterangan :

- 1) Diisi dengan nilai penyerapan DAK (murni) dan Dana Pendamping.
- 2) Diisi bila ada yang perlu dijelaskan.
Misal: nilai SP2D yang dilaporkan melebihi dana yang telah diterima Pemda dalam RKUD, sehingga sebagian nilainya akan dimasukkan dalam laporan berikutnya.
- 3) Penandatanganan hanya dapat diwakilkan minimal kepada Kepala Biro/ Kepala DPKAD / Kepala BPKAD/ Kabag Keuangan (apabila tidak ada struktur DPKAD/BPKAD) dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUMUM
u.b. BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN P.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

KOP SURAT

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Tahap I	:	Rp
Tahap II	:	Rp
Tahap III	:	Rp
Total	:	Rp

No.	Bidang *)	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa DAK di Kas Daerah	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d 31 Desember
1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6
1.	Pendidikan SD				
2.	Pendidikan SMP				
3.	Kesehatan Pelayanan Dasar				
4.	Kesehatan Pelayanan Farmasi				
5.	Kesehatan Pelayanan Rujukan				
6.	Infrastruktur Jalan				
7.	Infrastruktur Irigasi				
8.	Infrastruktur Air Minum				
9.	Infrastruktur Sanitasi				
10.	Prasarana Pemerintahan Daerah				
11.	Kelautan dan Perikanan				
12.	Pertanian				
13.	Lingkungan Hidup				
14.	Keluarga Berencana				
15.	Kehutanan				
16.	Sarana dan Prasarana Perdesaan				
17.	Perdagangan				
18.	Keselamatan Transportasi Darat				
19.	Listrik Perdesaan				
20.	Perumahan dan Pemukiman				
21.	Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan				
22.	Transportasi Perdesaan				
	Jumlah				

Tempat, Tanggal
Kepala Daerah

Nama

Keterangan :

*) Uralan Bidang disesuaikan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 1959042019840231001



MENTERI KEUANGAN,
ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN s/d

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2003 s.d. 2010 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Sisa DAK pada Akhir Tahun Anggaran		Penggunaan Sisa DAK Tahun Sebelumnya Pada Tahun berikutnya	
		Rupiah	Bidang	Rupiah	Bidang
1	2	3		4	5
1.	TA. 2003				
2.	TA. 2004				
3.	TA. 2005				
4	TA. 2006				
5.	TA. 2007				
6.	TA. 2008				
7.	TA. 2009				
8	TA. 2010dst				
	Jumlah				

Bukti-bukti realisasi pembayaran atas penggunaan sisa DAK kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Diisi sesuai bidang yang dibiayai dari sisa DAK untuk setiap tahun anggaran

Tempat, tanggal
Kepala Daerah

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
BIRO UMUM
KEPALA BUREAU T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP. 195901041984001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO